

**PENGUMUMAN HASIL ASESMEN TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM  
RANGKA PENGALIHAN PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA  
OLEH BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI**

**Jakarta, 5 Mei 2021**

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini akan menyampaikan Pengumuman Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).
2. Sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap **1.351 pegawai**. Terdapat 2 orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara.
3. Pelaksanaan Asesmen Pegawai KPK bekerjasama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh KPK untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN merupakan sebuah amanat dari Undang-undang sbb :
  - a. Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. (2) PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.
5. Berdasarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN sebagai berikut :
  - a. Setia dan Taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah;
  - b. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan; dan
  - c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
6. BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi, sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh proses penyelenggaraan.

7. Adapun aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainnya adalah :
- a. **Aspek Integritas.**  
Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur;
  - b. **Aspek Netralitas ASN.**  
Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
  - c. **Anti Radikalisme.**  
Anti Radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas.
8. Instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK sbb:
- a. Badan Intelijen Negara (BIN);
  - b. Badan Intelijen Strategis TNI;
  - c. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;
  - d. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;
  - e. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian "Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen".

5 instansi pelaksana asesmen TWK pegawai KPK bersama BKN RI terbagi dalam 3 kelompok peran. Pembagian peran 5 instansi sebagai berikut.:

- a. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas;
- b. Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan Profiling;
- c. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK;
- d. BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan
- e. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK.

9. Rangkaian asesmen TWK telah terlaksana dengan keterangan waktu sebagai berikut:
- a. Tes Tertulis Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan Integritas terlaksana pada tanggal 9 - 10 Maret 2021, dengan catatan sbb;
    - pelaksanaan susulan pertama pada tanggal 16 Maret;
    - pelaksanaan susulan ke dua pada tanggal 8 April 2021.
  - b. Pelaksanaan Profiling pada tanggal 9 sampai 17 Maret 2021.
  - c. Pelaksanaan Wawancara pada tanggal 18 Maret - 9 April 2021 dengan catatan sbb :
    - pelaksanaan susulan pertama tanggal 30 - 31 Maret 2021;
    - pelaksanaan susulan kedua tanggal 6 April 2021;
    - pelaksanaan susulan ketiga tanggal 9 April 2021.

Diinformasikan bahwa pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan hadir seperti bertugas luar kota, selesai isolasi mandiri, atau dalam kondisi tidak sehat yang diketahui oleh KPK.

Hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mengeluarkan **dua kesimpulan hasil tes pegawai KPK** :

- a. Memenuhi Syarat (MS) dan
- b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

10. Dan hari ini, KPK mengumumkan hasil Asesmen yang dilakukan BKN RI terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Pegawai yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1274 orang;
  - b. Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang;
  - c. Pegawai yang Tidak Hadir Wawancara sebanyak 2 orang.
11. Sesuai dengan keputusan rapat seluruh Pimpinan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural dilingkungan KPK hari ini, disimpulkan :
- a. Sekretaris Jenderal KPK akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan terhadap hasil Asesment Tes Wawasan Kebangsaan untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Syarat.
  - b. KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
  - c. Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
  - d. Perlu kami tegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN.

12. Rangkaian asesmen diyakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Individu-individu yang akan menjadi motor penggerak utama lembaga, menentukan bagaimana marwah dan wajah lembaga kedepan. Karena sangatlah mustahil bekerja sendiri di KPK yang tugasnya memberantas korupsi diseluruh negeri.
14. KPK meyakini bahwa segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga anti-rasuah selama ini, akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memberantas dimanapun tindak pidana korupsi terjadi.

**SELESAI**